

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KEDEPUTIAN INFORMASI DAN PEMASYARAKATAN
STANDARDISASI
TAHUN ANGGARAN 2016**



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

**JAKARTA
2017**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridhoNya, LAKIP Kedeputian Informasi Pemasarakatan Standardisasi Badan Standardisasi Nasional Tahun 2016 berhasil disusun dengan lengkap. Kewajiban menyusun LAKIP didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP Kedeputian IPS ini sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi.

LAKIP 2016 ini melaporkan pencapaian sasaran dan program di Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi. Laporan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 sesuai Penetapan Kinerja di tahun 2016 dan Rencana Strategis Kedeputian IPS Tahun 2015-2019 serta Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian IPS Tahun 2016 dapat memberikan manfaat bagi kita semua serta pemicu peningkatan kerja para pegawai Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Jakarta, 21 Februari 2017

Deputi Bidang Informasi dan Pemasarakatan
Standardisasi

Erniningsih

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
Tugas Pokok, Fungsi	1
A. Struktur Organisasi Kedeputian IPS	2
B. Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel Kedeputian IPS	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	4
A. Rencana Strategis 2015-2019	4
B. Penetapan Kinerja Kedeputian IPS	5
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Kinerja Proses	10-15
B. Pencapaian Kinerja	16-21
C. Akuntabilitas Keuangan	24-25
BAB IV PENUTUP	26
 LAMPIRAN	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan aktivitas analisis, penilaian yang sistemik, serta evaluasi pencapaian kinerja untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah. LAKIP Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi (IPS) - Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun Anggaran 2016 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja Kedeputian IPS – BSN selama Tahun Anggaran 2016. Capaian kinerja tersebut adalah capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2016 yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun Anggaran 2015-2019.

Penyusunan LAKIP Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi (IPS) BSN Tahun Anggaran 2016 pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2016. Kedeputian IPS telah menetapkan satu sasaran strategis yaitu meningkatkan persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui penyebarluasan informasi dan dokumentasi, pendidikan, pelatihan serta pemasarakatan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Eselon 1 meliputi : 1) Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI, 2) Tingkat persepsi masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). 3) Indeks kepuasan pelanggan layanan jasa informasi dan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian. 4) Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang SPK. 5) Jumlah akses informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis TIK. 6) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi IPS yang meningkat kompetensinya. 7) Realisasi anggaran Deputi IPS. 8) Jumlah *e-governance* yang mendukung tata kelola Deputi IPS.

Sasaran dan Indikator kinerja utama ini diwujudkan melalui pelaksanaan program pengembangan standardisasi nasional dan dua kegiatan, yaitu peningkatan informasi dokumentasi serta pendidikan dan pemasarakatan standardisasi.

Capaian kinerja Kedepuitian IPS pada tahun 2016 : 1) Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI, 2) Tingkat persepsi masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK). 3) Indeks kepuasan pelanggan layanan jasa informasi dan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian. 4) Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang SPK. 5) Jumlah akses informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis TIK. 6) Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi IPS yang meningkat kompetensinya. 7) Realisasi anggaran Deputi IPS. 8) Jumlah *e-governance* yang mendukung tata kelola Deputi IPS.

Penyerapan anggaran tahun 2016 adalah Rp. 8.855.598.728 ,- atau mencapai 99,2% dari pagu Rp. 8.880.452.000 ,-. Kedepuitian IPS memiliki dua layanan PNBPN, yaitu layanan Jasa Pelatihan Standardisasi di Pusdikmas dan layanan Jasa Informasi di Pusido. Adapun penerimaan PNBPN tahun 2016 untuk layanan jasa informasi standardisasi sebesar Rp. 942.566.148 atau 99,99% dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. Rp 942.584.000,-. Penerimaan PNBPN untuk layanan jasa diklat standardisasi sebesar Rp. 1.183.400.000,- (101,23%) dari yang ditargetkan yaitu sebesar Rp. 1.169.000.000.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan	3
Tabel 2 Penetapan target Kedeputian IPS Tahun 2016	5
Tabel 3 Unsur Indikator Kinerja	6
Tabel 4 Pengkategorian Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan	8
Tabel 5 Program dan Kegiatan Lingkup Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi	10
Tabel 6 Kegiatan dan Output kegiatan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi	11
Tabel 7 Kegiatan dan Output kegiatan Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi	13
Tabel 8 Capaian IKU 2015 – 2016 dan Target IKU 2015 – 2016	16
Tabel 9 Mekanisme pelaksanaan survei di Kedeputian IPS	17
Tabel 10 Rekapitulasi Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Informasi Standardisasi dan Layanan Jasa Diklat Standardisasi	17
Tabel 11 Capaian dan Target Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Informasi Standardisasi dan Layanan Jasa Diklat Standardisasi Tahun 2015 – 2016	18
Tabel 12 Perbandingan Survei Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Standardisasi ..	19
Tabel 13 Capaian IKU IPS Tahun 2015	24
Tabel 14 Perbandingan Kinerja Anggaran Kedeputian IPS Tahun 2015 – 2016	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Kedeputian IPS	2

BAB I

PENDAHULUAN

Tugas Pokok

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional Pasal 113, Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi (IPS) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan pemasarakatan standardisasi.

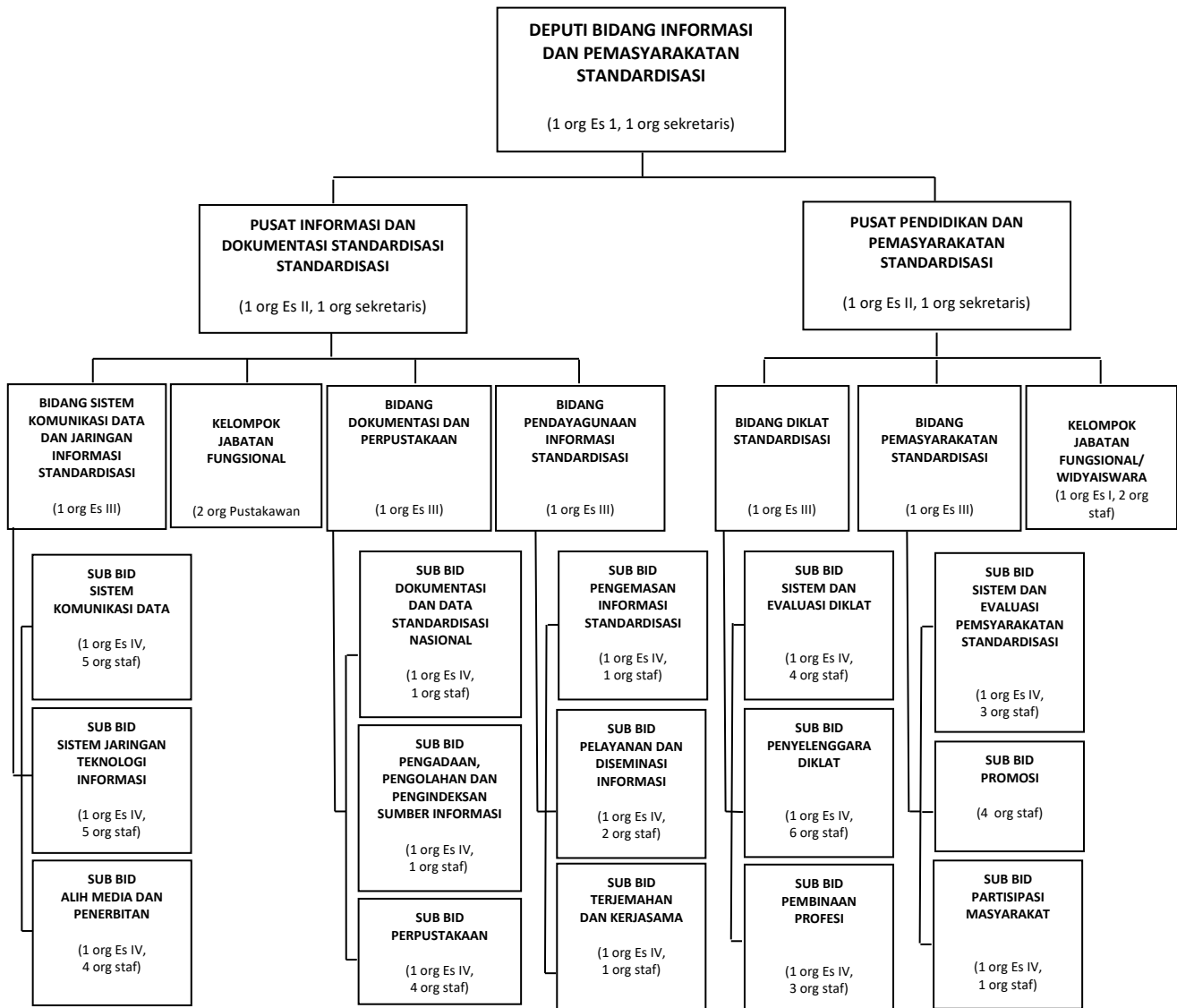
Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 113, Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, serta pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
- b. penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
- c. pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
- d. penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi;
- e. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasarakatan standardisasi.

A. Struktur Organisasi Kedepujian IPS

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, pada tahun 2016 Kedepujian IPS memiliki personel sebanyak 73 orang, terdiri dari 1 orang Eselon I, 2 orang Eselon II, 5 orang Eselon III, 15 Orang Eselon IV, 1 orang Fungsional Pustakawan, 2 orang widyaiswara dan 30 orang Staf dengan rincian sesuai Struktur Organisasi berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Kedepujian IPS

B. Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan Personel Kedeputan IPS

Pada tahun 2016, jumlah personel Kedeputan Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi mengalami penambahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2015, hal yang didapat melalui proses mutasi pegawai maupun adanya penambahan CPNS baru dengan komposisi dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.
Komposisi dan Kualifikasi Pendidikan

No.	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN					Σ Total
		S3	S2	S1	S0	SMA	
1.	Eselon I	-	-	1	-	-	1
2.	Eselon II	-	2	-	-	-	2
3.	Eselon III	-	3	2	-	-	5
4.	Eselon IV		4	11	-		15
5.	Fungsional Pustakawan	-	1	1	-	-	2
6	Fungsional Widyaiswara	-	1	2	-	-	3
6.	Staf	-	2	33	3	7	45
	Σ Total		12	49	3	7	73

Jumlah personel aktif di Kedeputan IPS mengalami penambahan ASN 2 orang dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu 1 orang rotasi pejabat es. 4 dan 1 orang Widyaiswara Utama.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 06/KEP/BSN/2/2015 tentang Perubahan atas peraturan kepala BSN Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019, maka rencana strategis Kedeputian IPS tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Visi Kedeputian IPS

Visi Kedeputian bidang informasi dan pemyarakatan standardisasi adalah
Meningkatkan budaya standar di masyarakat

Misi

Mengembangkan budaya standar, kompetensi dan sistem informasi di bidang
standardisasi dan penilaian kesesuaian

Tujuan

Meningkatkan persepsi, partisipasi dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui
edukasi publik dan pemanfaatan sistem informasi SPK

Sasaran Strategis

Sasaran strategis (*outcome*) Kedeputian IPS adalah meningkatnya persepsi, partisipasi
dan kompetensi masyarakat di bidang SPK melalui penyebarluasan informasi dan

dokumentasi, pendidikan, pelatihan serta pemasyarakatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Kebijakan

Kebijakan yang ditetapkan oleh Kedepujian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi adalah :

1. Meningkatkan persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK)
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang SPK
4. Meningkatkan kemudahan, ketepatan dan kecepatan akses dan layanan informasi melalui Sistem Informasi SPK

Program

Membangun budaya standar perlu dilakukan secara intensif agar masyarakat menyadari betul pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi yang mencakup pengembangan dan penerapan standar. Hal ini sangat ditentukan oleh upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian, yang antara lain dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pemasyarakatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi, serta peningkatan kemudahan akses dan diseminasi informasi standardisasi kepada masyarakat.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra BSN, Kedepujian Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi BSN telah menetapkan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan, yaitu Program Peningkatan Budaya Mutu, dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. Peningkatan informasi dan dokumentasi Standardisasi;

b. Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi.

B. Penetapan Kinerja Kedeputian IPS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil di setiap unit eselon 1, maka diperlukan adanya Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan penetapan target kinerja 2015 yang tertuang dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani Deputi Bidang Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi, yaitu :

Tabel 2.
Penetapan target Kedeputian IPS tahun 2016

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Stakeholder Perspectives		
1 Meningkatnya daya saing produk berstandar	1 Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI	3,2 Skor
Customer Perspectives		
2 Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	2 Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian	3,8 Skor
	3 Indeks kepuasan pelanggan layanan informasi standardisasi dan pelatihan bidang SPK	83 skor
Internal Process Perspectives		
3 Meningkatnya budaya mutu	4 Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian	550,000 orang
	5 Jumlah akses informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis TIK	1,4 juta akses
Learning and Growth Perspectives		
4 Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi IPS yang profesional	6 Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi IPS yang meningkat kompetensinya	100 %
	7 Realisasi anggaran Deputi IPS	≥95 %
	8 Jumlah <i>e-governance</i> yang mendukung tata kelola Deputi IPS	7 Aplikasi

1. Tingkat Persepsi Masyarakat terhadap daya saing produk ber SNI

Untuk mendukung indikator kinerja utama Deputi bidang Informasi dan Pemasaryakatan Standardisasi, bidang Pemasaryakatan Standardisasi menyelenggarakan survei Tingkat Persepsi Masyarakat terhadap daya saing produk ber SNI. Ketika masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap daya saing produk berSNI, artinya masyarakat menilai bahwa produk berSNI mempunyai daya saing yang tinggi dan asumsi, masyarakat percaya produk berSNI mempunyai keunggulan lebih dibanding produk yang tidak memenuhi SNI. Seharusnya produk yang berSNI dapat lebih berdaya saing di pasar baik di pasar lokal dan nasional.

Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI, BSN melakukan survei dengan 4000 responden yang dilakukan di 10 kota besar, yaitu Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manado dan Bali. Survei disebarkan kepada stakeholder yang terdiri dari unsur akademisi, pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Berdasarkan hasil survei, persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI cukup tinggi yaitu dengan skor 4,05 (skala likert, kategori baik). Nilai ini melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 3,2 atau tercapai (125%). Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai persepsi yang positif bahwa produk berSNI mempunyai daya saing yang cukup baik dan masyarakat juga mempunyai persepsi yang positif bahwa produk berSNI mempunyai *value* yang lebih dibanding produk yang tidak ber SNI.

2. Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Untuk mendukung indikator kinerja utama Tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK, Bidang Pemasaryakatan Standardisasi juga melakukan survei tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK. Kegiatan ini juga dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja utama deputi bidang informasi dan pemasaryakatan standardisasi. Kegiatan penyebarluasan informasi, pendidikan, pemasaryakatan standardisasi yang dilakukan BSN diharapkan meningkatkan penerapan SNI di kalangan pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk bertanda SNI sehingga masyarakat berorientasi pada produk berSNI. Keberhasilan kegiatan pendidikan, pemasaryakatan standardisasi dan penyebarluasan informasi serta pembinaan

penerapan SNI diharapkan akan menghasilkan persepsi masyarakat terhadap SPK semakin baik.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN melakukan survei yang diselenggarakan secara bersamaan dengan survei persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI. Survei dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 4000 responden.

Tabel 10. Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2016

Pernyataan	Nilai Indeks	Prosentase	Indeks Total	Indeks Total dalam skala 5
Pengetahuan Tentang BSN	19,13 (dari 25)	76,52	75,02	3,75
Pengenalan Tentang SNI	21,69 (dari 25)	86,76		
Penerapan SNI	19,51 (dari 25)	78,04		
Sertifikasi SNI	14,69 (dari 25)	58,76		

Berdasarkan tabel tersebut, secara keseluruhan persepsi masyarakat terhadap SPK sudah baik. Masyarakat sudah mengetahui institusi BSN yang menetapkan SNI (76,52 %) dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 49,2%. Namun sebagian juga ada yang masih memahami bahwa sertifikasi SNI itu dilakukan oleh BSN. Secara umum, masyarakat sudah tahu SNI, apa itu SNI, dan tanda SNI pada produk (86,76%). Masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap penerapan SNI untuk meningkatkan daya saing produk dan untuk perlindungan masyarakat (78,04%). Namun terkait dengan sertifikasi SNI, persepsi masyarakat masih rendah (58,76 %). Masyarakat masih melihat bahwa proses sertifikasi itu tidak mudah dan rumit serta mahal. Disamping itu masyarakat juga belum memahami bahwa sertifikasi SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk. Persepsi ini hampir sama untuk semua unsur stakeholder.

Berdasarkan hasil tersebut, tingkat persepsi masyarakat menghasilkan indeks persepsi sebesar 75,02 (skala 100) atau 3.75 (skala 5). Nilai ini tidak mencapai target yang diharapkan sebesar 3,8, atau hanya tercapai 98,7 %. Hal ini dikarenakan nilai yang terkait dengan persepsi tentang Sertifikasi SNI masih rendah, meskipun sudah naik dari tahun sebelumnya yang hanya 50,4 %. Untuk itu, perlu edukasi kepada

pemangku kepentingan khususnya kepada pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi SNI dan juga BSN kerjasama dengan stakeholder perlu meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur mutu (LPK), sehingga LPK mudah didatangi oleh pelaku usaha di wilayah tersebut yang membuat biaya sertifikasi bisa diminimalisir.

Untuk melihat efektifitas pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi, dalam survei tersebut, BSN juga menanyakan strategi promosi yang diharapkan oleh masyarakat masih didominasi melalui media mainstream seperti TV, Radio, media cetak dll. Responden yang memilih media online sebagai sumber informasi mengenai SNI hanya 6,3%, cenderung turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 16,6%. Hal ini bisa saja disebabkan karena mayoritas usia responden berada pada rentang 35 – 55 tahun. Pada usia responden ini, lebih menyukai media *mainstream* dan belum banyak yang menyukai media online. Selain itu, masyarakat di daerah masih menyukai informasi yang didapatkan dari media cetak atau televisi. Akademisi (dosen) justru yang lebih banyak memilih media online (sosial media, media berita online) sebagai sumber informasi mengenai SNI.

3. Indeks kepuasan pelanggan layanan informasi standardisasi dan diklat standardisasi.

Kedeputan IPS mengelola dua layanan PNBPN, yaitu layanan jasa informasi standardisasi di Pusido dan layanan jasa pelatihan standardisasi di Pusdikmas. Survey kepuasan pelanggan telah dilaksanakan untuk ke dua layanan tersebut.

Tabel 7. Nilai Konversi IKP Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval Pengguna	Nilai Interval Konversi IKP	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,0 – 1,8	20 - 36	E	Sangat tidak baik
1,8 – 2,6	36 - 52	D	Tidak baik
2,6 – 3,4	52 - 68	C	Sedang
3,4 – 4,2	68 - 84	B	Baik
4,2 - 5	84 - 100	A	Sangat Baik

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan PNBP di bawah Kedeputusan IPS dilakukan melalui survei kepada pelanggan jasa informasi dan pelatihan standardisasi. Adapun mekanisme survei yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. **Tabel 5. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM di Layanan Jasa Diklat**

Item Survei	Layanan Jasa Diklat	Layanan Jasa Informasi
Metode	<i>Total Sampling**</i>	<i>Total Sampling**</i>
Jumlah responden	1224 orang	150 responden
Unsur layanan Kemenpan RB	14 unsur dan tambahan	9 unsur
Waktu Pelaksanaan	Januari s.d Desember	April-Oktober
Tempat Pelaksanaan	Lokasi Pelatihan	Perpustakaan BSN

*) Kuesioner dibagikan kepada pengunjung perpustakaan yang datang berkunjung

**) Kuesioner dibagikan kepada seluruh peserta dan *personal in charge* pelatihan

Pengolahan data dilakukan per unsur layanan yang mengacu pada 14 unsur yang ditetapkan dalam Kepmen PAN dan RB diatas ditambah dengan unsur pengembangan sesuai dengan dimensi atau unsur pengaruh kualitas pelatihan, yaitu instruktur pelatihan, materi pelatihan dan asisten instruktur pelatihan. Adapun hasil pengolahan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 6. Rekapitulasi Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi

No.	Elemen Pertanyaan	Skor	Nilai IKP
1.	Kemudahan Prosedur Pelayanan Pelatihan	4,24	84,71
2.	Kejelasan Informasi Persyaratan Pelayanan Pelatihan	4,25	84,99
3.	Kejelasan Petugas/Sekretariat Pelayanan pelatihan	4,17	83,44
4.	Kedisiplinan Petugas/Sekretariat Pelayanan Pelatihan	4,32	86,39
5.	Tanggung Jawab Petugas/Sekretariat Pelayanan Pelatihan	4,34	86,74
6.	Kemampuan Petugas/Sekretariat Pelayanan Pelatihan	4,17	83,38
7.	Kecepatan Pelayanan Pelatihan	4,18	83,61
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan pelatihan (tidak diskriminatif)	4,36	87,26

9.	Kesopanan dan Keramahan Petugas/Sekretariat Pelayanan Pelatihan	4,47	89,48
10.	Kewajaran biaya pelayanan pelatihan	4,14	82,81
11.	Kepastian biaya pelayanan pelatihan	4,27	85,36
12.	Kepastian jadwal pelayanan pelatihan	4,20	84,05
13.	Kenyamanan tempat pelayanan pelatihan	4,39	87,75
14.	Keamanan tempat pelayanan pelatihan	4,42	88,33
15.	Instruktur menguasai materi pelatihan	4,59	91,77
16.	Instruktur mampu menyampaikan materi secara jelas	4,49	89,78
17.	Instruktur mampu memberikan motivasi kepada peserta	4,30	86,07
18.	Instruktur mampu menjawab pertanyaan peserta dengan jelas dan tuntas	4,43	88,56
19.	Instruktur mampu mengelola waktu pelatihan dengan baik	4,23	84,54
20.	Materi pelatihan sesuai dengan sasaran pelatihan	4,44	88,73
21.	Sistematika materi pelatihan mudan dipahami	4,17	83,33
22.	Materi pelatihan sesuai dengan perkembangan terkini (mutakhir)	4,29	85,82
23.	Asisten instruktur mampu membantu kelancaran proses pelatihan	4,22	84,41
24.	Asisten instruktur mampu berkomunikasi secara efektif dengan peserta	4,27	85,35
25.	Asisten instruktur mampu berperilaku baik (sopan)	4,46	89,22
	Rata-rata	4,32	86,32

Kegiatan pelayanan jasa diklat yang dilaksanakan oleh BSN sangat diminati baik dari pihak industri, pemerintah, akademisi dan konsumen. Pelatihan yang diselenggarakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Diklat BSN telah melaksanakan 8 (delapan) kali *public training* dan 51 (empat puluh tiga) kali *in-house training*, sehingga secara keseluruhan Diklat BSN menyelenggarakan 59 pelatihan di tahun 2016. Perkembangan pelatihan selama tahun 2015 - 2016 berdasarkan jenis pelatihan dan klasifikasi peserta pelatihan dapat dilihat pada tabel di bawah.

No	Elemen Pernyataan	Jasa Informasi	
		Score	IKP
1	Persyaratan untuk memperoleh layanan di Perpustakaan BSN relatif mudah	4,14	82,78
2	Prosedur layanan di Perpustakaan BSN mudah untuk diikuti.	4,08	81,59
3	Jam buka layanan Perpustakaan BSN sesuai bagi Anda	4,23	84,50
4	Anda merasa yakin dalam bertransaksi di Perpustakaan BSN	3,99	79,87
5	Tarif reproduksi dokumen standar di Perpustakaan BSN sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku	4,16	83,18
6	Perpustakaan BSN memiliki koleksi dokumen standar yang lengkap dan terkini	4,21	84,11
7	Staf Perpustakaan BSN memberikan informasi layanan dengan jelas dan mudah diperoleh/diakses	4,18	83,58
8	Staf Perpustakaan BSN memiliki pengetahuan yang luas sehingga mampu menjawab pertanyaan Anda.	4,15	82,91
9	Staf Perpustakaan BSN selalu siap dan bersedia membantu Anda.	4,28	85,56
10	Staf Perpustakaan BSN bersikap ramah dan sopan dalam melayani permintaan anda	4,19	83,71
11	Perilaku staf Perpustakaan BSN mampu membuat Anda percaya bahwa mereka mampu melayani Anda	4,23	84,50
12	Perpustakaan BSN selalu konsisten memberikan layanannya secara tepat waktu	4,09	81,72
13	Perpustakaan BSN menyediakan layanan sesuai standar layanan yang dijanjikan	4,20	84,11
14	Perpustakaan BSN melakukan penanganan pengaduan dan saran dengan baik	4,10	82,13
	Rata-rata	4,16	83,16

4. Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK).

5. Jumlah akses informasi SPK berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

6. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi IPS yang meningkatkan kompetensinya.

7. Prosentase Peningkatan Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Bidang SPK

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sangatlah diperlukan. Partisipasi masyarakat tertuang dalam UU No 20 Tahun

2014 BAB VI Pasal 52. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, BSN harus memberikan penyadaran, pemahaman dan berbagi pengetahuan mengenai standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk mengajak masyarakat untuk mau berpartisipasi. BSN memberikan akses kepada masyarakat agar bias dan mudah berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Meningkatnya partisipasi masyarakat, sangat ditentukan oleh 3 (tiga) unsur pokok, yaitu:

- 1). Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi
- 2). Adanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi
- 3). Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi

Dengan semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian, menjadi indikator terwujudnya masyarakat berbudaya standar. Unsur Indikator Kinerja Utama dari masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian seperti dalam Tabel 3:

Tabel 3.

Unsur Indikator Kinerja Utama Masyarakat Yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan penilaian kesesuaian

Unsur Indikator	Sub Unsur Indikator	Satuan	Target
jumlah masyarakat yang berpartisipasi di dalam pemanfaatan informasi, diklat dan pemasyarakatan SPK.	1. Jumlah pemanfaat paket informasi standardisasi; 2. Jumlah peserta pembimbingan UKM. 3. Jumlah peserta 4. Jumlah peserta pendidikan standardisasi (dosen/guru & mahasiswa/siswa) 5. Jumlah peserta pelatihan standardisasi (Instruktur & peserta) 6. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam edukasi, diklat, pameran, sosialisasi dan pemasyarakatan standardisasi	Orang	550.000
	Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan Standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui media elektronik, al: melalui TV, Radio, blog, <i>e-learning</i> dsbnya.	Orang/ Pengunjung/ Pembaca	1.250.000
Jumlah total		orang	1.800.000

Cara pengukuran indikator kinerja untuk prosentase peningkatan partisipasi masyarakat yang berpartisipasi dalam Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dengan rumus:

$$P = \left\{ \frac{X_n - X_{(n-1)}}{X_{(n-1)}} \right\} \times 100\%$$

Keterangan:

P: Presentase peningkatan per tahun

n: tahun berjalan

Xn: jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan SPK dalam tahun berjalan yang terdiri dari:

- a. jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan SNI
- b. Jumlah pelaku usaha dan masyarakat yang berpartisipasi dalam penerapan SNI
- c. Jumlah stakeholder yang terlibat dalam kegiatan penilaian kesesuaian
- c. jumlah masyarakat yang berpartisipasi di dalam pemanfaatan informasi, diklat dan pemasyarakatan SPK.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kinerja Proses

Pencapaian Indikator Kinerja Kedeputan Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi didasarkan pada kontrak penetapan kinerja tahun 2016, yaitu:

1. Tingkat Persepsi Masyarakat Terhadap Standardisasi
2. Persentase peningkatan masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian
3. Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Standardisasi yaitu jasa Diklat dan Jasa Informasi Standardisasi

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut di atas, Kedeputan Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi telah menetapkan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan, seperti tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 5.
Program dan Kegiatan
Lingkup Kedeputan Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi

Program	Kegiatan	Unit Organisasi
Pengembangan Standardisasi Nasional	Peningkatan Informasi dan Dokumentasi Standardisasi	Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi
	Pendidikan dan pemasarakatan Standardisasi	Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi

Untuk mencapai 3 (tiga) indikator kinerja utama, dilakukan 2 kegiatan dan beberapa output kegiatan. Rincian kegiatan Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi tahun 2016 dengan 4 output kegiatan tertera dalam Tabel 6

Tabel 4. Kegiatan, Anggaran dan Output Pusat Informasi dan Dokumentasi Standardisasi Tahun 2016

Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Output kegiatan
1. Informasi Standardisasi	3.249.200.000		Tersedianya 8 paket informasi standardisasi
a. Informasi standardisasi	584.983.000	8 paket	
1.1 Penyusunan alat akses informasi standardisasi			1. Alat akses informasi standardisasi
a. Pengembangan kebijakan layanan dokumentasi dan perpustakaan			2. Kebijakan layanan informasi standardisasi
b. Pengembangan koleksi standardisasi			2. Pengembangan koleksi perpustakaan (buku, standar dan e-book)
a. Pengembangan perpustakaan digital			3. Pengembangan <i>content digital library</i>
a. Literasi informasi standardisasi			4. Literasi informasi standardisasi (<i>awareness</i> informasi standardisasi untuk mahasiswa dan pengelolaan informasi di K/L)
a. Promosi layanan standar dan koleksi standardisasi			5. Promosi layanan perpustakaan dan koleksi standardisasi (bedah buku)
a. Pengelolaan layanan perpustakaan dan dokumentasi			6. Pengelolaan dokumentasi dan data 7. Pengelolaan layanan perpustakaan dan dokumentasi
8 Pengembangan dan Perluasan SNI Corner	649.056.000	4 SNI Corner	Pengelolaan SNI corner di 4 lokasi, yaitu : Baristan Surabaya, Universitas Negeri Jember, Universitas Jenderal Soedirman, dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara - Kementerian ESDM
2. Penguatan Jejaring Informasi Standardisasi	471.754.000	7 Jejaring	Bertambahnya Jejaring & diseminasi kemasan informasi
2.1 Pengembangan kemasan informasi standardisasi;			Disusunnya 16 kemasan informasi tercetak (kalender, brosur, booklet, bulletin, direktory SNI Wajib, dan sebagainya)
2.2 Penguatan kerjasama jejaring informasi standardisasi;			1. Jejaring bertambah sebanyak 5 anggota INSTANET di 4 kota, dengan total keanggotaan dari 170 menjadi 175 simpul.

Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Output kegiatan
			2. Peningkatan kompetensi Petugas Layanan di simpul Jejaring INSTANET (UPT Perpustakaan IPB, UPT Perpustakaan ITB, dan BPSMB-LT Jember)
2.3 Terjemahan dan alih bahasa dokumen standardisasi;			Tersedianya 141 dokumen SNI diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dan 2 dokumen standardisasi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk memperkaya layanan informasi.
2.4 Diseminasi informasi standardisasi.			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan diseminasi publikasi BSN sejumlah 50.917 yang disampaikan kepada unit kerja pemerintah, swasta, organisasi dan pengguna perseorangan. 2. Partisipasi di 3 pameran yang diselenggarakan sepanjang 2016, yaitu : BMN 2016, RiTech Expo, UMKM di JHCC. 3. Diseminasi informasi SPK dengan Disperindag Semarang dan Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara - Kementerian ESDM 4. Layanan Penelusuran informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (inquiry), sebanyak 1914 penelusur melalui email, telepon, datang langsung ke petugas Layanan informasi BSN. 5. Pembuatan video succes story UMKM Penerap SNI CV Kanaba Yogyakarta
3. Aplikasi Sistem Informasi Standardisasi	737.064.214		
3.1 Pengembangan aplikasi sistem informasi			<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Keamanan Informasi ; 2. Desktop Assessment Indeks Keamanan Informasi (KAMI) 2016 ; 3. Sosialisasi peraturan Permenkominfo No. 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi 4. Pembuatan Aplikasi Redesain Portal Website ; 5. Pengembangan SDM lingkup Teknologi Informasi ; 6. Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001) ; 7. Pengelolaan konten website BSN

Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Output kegiatan
			8. Koordinasi pengembangan/pemeliharaan aplikasi
3.2 Pengembangan dan pemeliharaan jaringan			1. Survey Kepuasan Pelanggan ; 2. Monitoring jaringan PC Client ; 3. Pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi ; 4. Study Visit Penerapan SNI ISO/IEC 27001:2013
3.3 Pengembangan Alih Media dan Penerbitan SNI			1. Penerbitan SNI Penetapan 2016 untuk PT/SPT (500 eksemplar), dengan total cetakan 21.596 lembar 2. Pelaksanaan program SNI Channel 3. Validitas Data Jumlah SNI
4. Layanan Jasa Informasi Standardisasi	942.584.000		
4.1 Layanan permintaan Informasi referensi/standar			Data permintaan informasi
4.2 Layanan Penjualan Dokumen SNI dan Standar Internasional			Data penjualan SNI dan standar lainnya

Sedangkan rincian kegiatan Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 7 berikut:

Tabel 7.
Kegiatan dan Ouput Kegiatan
Pusat Pendidikan dan Pemasarakatan Standardisasi Tahun 2016

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Output Kegiatan
1. Jejaring Pendidikan Standardisasi	658.888.000	5 paket Kegiatan	
1.1. Jejaring Pendidikan Tinggi			a. Laporan penyelenggaran pendidikan standardisasi di 3 perguruan tinggi (UNDIP, UNMAS, Universitas Jember, UNSRI) b. Dua (2) kunjungan ke universitas untuk penyusunan Road Map Penddiikan Standardisasi (UNMAS dan Universitas Balikpapan) c. Penetapan pengurus FORSTAN; d. Penyelenggaraan Forum Pendidikan Standardisasi. e. Pertemuan Board Mmember ICES dan

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Output Kegiatan
1.2. Jejaring Pendidikan Menengah a. Olimpiade Standar Tingkat Sekolah Menengah			a. Terselenggaranya Kompetisi Essay Standardisasi Tingkat Nasional SMA/SMK Tahun 2016 yang diikuti oleh 40 peserta. b. Juara I dan III Internasional Standard Olimpiad di Korea.
1.3. Jejaring Pendidikan Dasar Training of trainers (ToT) Standardisasi bagi Guru Sekolah Dasar			Tidak diselenggarakan karena pemotongan anggaran
1.4. Jejaring Pendidikan Umum a. Peningkatan Pelayanan Pelatihan Standardisasi melalui penyusunan dan penyempurnaan materi pendidikan dan pelatihan b. Pembinaan dan Pengembangan kompetensi instruktur pelatihan c. Review Sistem Manajemen Mutu Diklat d. Monitoring dan Evaluasi Diklat			a. Penambahan 7 materi baru untuk pelatihan SPK (PNBP) dan Pendidikan Standardisasi, yaitu : (1). b. Peningkatan pemahaman instruktur dan asisten instruktur pelatihan SPK melalui kegiatan pelatihan. c. Dokumen revisi prosedur dan form sebagai tindak lanjut temuan baik audit internal maupun audit eksternal d. Laporan review kegiatan bidang Diklat
1.5. Pengembangan Materi <i>e-learning Economic Benefit of Standard</i> .			Pengembangan materi elearning dalam bentuk : video presentasi, <i>flipbook</i> dan video animasi
2. Promosi Standardisasi	4.085.000.000	4 paket Kegiatan	
2.1. Promosi untuk Stakeholder a. Persiapan b. Pelaksanaan Promosi SNI untuk Stakeholder Melalui Pertemuan			a. Persiapan - Pembuatan booklet substansi SNI mengenai Alat Tangkap Ikan sebanyak 1.000 eksm - Pembuatan materi promosi SNI (Lesson Learned UKM penerap SNI) melalui audio visual sebanyak 4 jenis - Pembuatan materi promosi infografis sertifikasi SNI b. Pelaksanaan - Sosialisasi SNI alat Tangkap Ikan - Edukasi SNI melalui Jelajah SNI (<i>Lesson Learned</i> penerapan SNI) pada 5 UKM di Jateng - Sosialisasi peran SNI dalam meningkatkan ekspor - Talk show manfaat penerap SNI dalam

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Output Kegiatan
<p>2.2. Promosi untuk Penerap SNI</p> <p>a. Persiapan/Perencanaan Kegiatan</p> <p>b. Pelaksanaan Promosi untuk Rekrutasi Penerap SNI melalui Media massa</p> <p>c. Promosi untuk Rekrutasi Penerap SNI dalam Bentuk Pertemuan</p>			<p>meningkatkan daya saing produk.</p> <p>a. Persiapan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan booklet promotion kit untuk sosialisasi SNI Award <p>b. Promosi SNI Award melalui media dilakukan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penayangan iklan dan dialog di Radio Smart FM, Elshinta dan Delta FM 2. Promosi SNI Award di Majalah Swa, di Koran Jawa Pos, di Majalah Sindo Weekly, SMS Blasting dan Email Blasting kepada segenap stakeholder BSN. 3. Promosi SNI melalui pemasangan banner di media online Swa.co.id, media online fajar.co.id, celebes.co.id, antara.co.id, 2. Promosi penerima SNI Award di Metro TV , harian Media Indonesia, media social dan sms blasting <p>c. Pelaksanaan Rekrutasi SNI Award kerjasama dengan Pemda, LPK, MASTAN dan komunitas sebanyak 11 kali</p>

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Output Kegiatan
<p>2.3. Promosi untuk Publik</p> <p>a. Edukasi Publik melalui Area Terbuka, Transportasi Publik dan Media Massa</p> <p>b. Edukasi SNI kepada Publik melalui Edutainment, Edugames dan Kampanye Massal</p> <p>c. Penerbitan Majalah SNI Valuasi</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi Pemasaran Standardisasi</p>			<p>a. Edukasi SNI melalui transportasi publik dan di jalan tol, liputan edukasi SNI melalui gerak jalan santai di Kompas TV, Promosi SNI melalui peta mudik, Promosi SPK melalui program Economic Challenges di di Metro TV</p> <p>b. Edukasi SNI kepada public melalui Pemasangan infografis dan audio visual di Taman Pintar Jogjakarta, Edukasi SNI kepada publik melalui edugames standardisasi pada pameran HAKTEKNAS</p> <p>c. Pencetakan majalah SNI Valuasi sebanyak 4 edisi dengan masing-masing 8.000 eksemplar</p> <p>d. Survei tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi di 10 kota dengan nilai indeks</p>
<p>3. Partisipasi Masyarakat Standardisasi dalam Pengembangan Standardisasi</p>	<p>1.272.940.000</p>	<p>3 paket kegiatan</p>	
<p>3.1. Pembinaan Masyarakat untuk Meningkatkan Partisipasi dalam Pengembangan SNI</p>			<p>1. Pembinaan masyarakat dalam pengembangan SNI sebanyak 2 komunitas (MASTAN, PUPUK) untuk Rancangan SNI Asap Cair, komponen pesawat terbang, ecolabel produk rotan, Konverter Kit.</p> <p>2. Forum Diskusi Peningkatan partisipasi Konsumen dalam kegiatan standardisasi yang dihadiri 80 orang peserta.</p> <p>3. Temu Nasional Masyarakat Standardisasi yang dihadiri 150 orang</p>
<p>3.2. Pembinaan Masyarakat dalam Penerapan SNI</p>			<p>1. Pembinaan kelompok masyarakat dalam penerapan SNI sebanyak 4 komunitas yaitu komunitas TDA, PUPUK, Flipmas dan MASTAN</p>

Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target	Output Kegiatan
			2. Pembinaan masyarakat sebagai Fasilitator SNI Award 3. Pembinaan role model pelaku usaha PT KANABA dalam penerapan SNI
3.3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Standardisasi di Forum Internasional			1. Laporan Sidang ISO COPOLCO ke 36, 2. Laporan sidang IFAN
3.4. Layanan jasa pelatihan standardisasi	997.612.000	5 paket kegiatan	
4.1. Layanan Pelatihan <i>Public Training</i>			Delapan (8) layanan pelatihan publik
4.2. Layanan Pelatihan <i>In House Training</i>			Empat puluh tiga (43) layanan pelatihan in-house
4.3. Pengembangan program dan sarana pelatihan			a. Benchmarking dan sharing <i>knowledge</i> dengan Badan Standardisasi dari Malaysia b. Standar Layanan Publik
4.4. Analisa Kompetensi Lembaga Penyedia Pelatihan Berdasarkan SNI ISO 29990:2013			Analisis kompetensi penyelenggara pelatihan berdasarkan SNI ISO 29990:2013 di RCChem Bandung
4.5. Monitoring dan evaluasi pelatihan standardisasi			a. Monitoring penyelenggaraan pelatihan melalui 4 kegiatan witness b. Feedback pengguna layanan pelatihan standardisasi melalui kegiatan temu pelanggan

B. Pencapaian Kinerja

Indikator 1 Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-SNI

Untuk mendukung indikator kinerja utama Deputi bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, bidang Pemasyarakatan Standardisasi menyelenggarakan survei Tingkat Persepsi Masyarakat terhadap daya saing produk ber SNI. Ketika masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap daya saing produk berSNI, artinya masyarakat menilai bahwa produk berSNI mempunyai daya saing yang tinggi dan asumsi, masyarakat percaya produk berSNI mempunyai keunggulan lebih dibanding produk yang tidak memenuhi SNI. Seharusnya produk yang berSNI dapat lebih berdaya saing di pasar baik di pasar lokal, nasional maupun global.

Untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI, BSN melakukan survei dengan 4000 responden yang dilakukan di 10 kota besar, yaitu Medan, Riau, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Samarinda, Makassar, Manado dan Bali. Survei disebarakan kepada stakeholder yang terdiri dari unsur akademisi, pelaku usaha, konsumen dan pemerintah. Berdasarkan hasil survei, persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI cukup tinggi yaitu dengan skor 4,05 (skala likert, kategori baik). Nilai ini melebihi target yang diharapkan yaitu sebesar 3,2, tercapai (125%). Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat mempunyai persepsi yang positif bahwa produk berSNI mempunyai daya saing yang cukup baik dan masyarakat juga mempunyai persepsi yang positif bahwa produk berSNI mempunyai value yang lebih dibanding produk yang tidak ber SNI.

Indikator 2

Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian

Indeks Tingkat Persepsi Masyarakat terhadap standardisasi

Tahun 2016 BSN bekerjasama dengan Universitas Surabaya (UBAYA) untuk melakukan survey tentang tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi adalah koleksi data primer, survei dan observasi lapangan. Sedangkan metodologi penyampaian pertanyaan kepada responden, terbagi atas : (1) Pertanyaan tertutup (pilihan jawaban *multiple choice*, hanya satu jawaban yang benar), (2) Pertanyaan urutan prioritas (pilihan jawaban *multiple choice*, jawaban diberi ranking sesuai jawaban responden); (3) Pertanyaan skala sikap/likert (responden memberikan jawaban berupa sikap, seperti : sangat setuju s.d sangat tidak setuju) ; dan (4) Pertanyaan terbuka (responden dapat memberikan jawaban apapun). Kemudian untuk mengukur tingkat validitas dan variabilitas data, kolektor data memastikan bahwa responden dapat menjawab dengan benar maksud dalam setiap pertanyaan kuesioner. Sedangkan untuk pertanyaan *multiple choice*, cukup dengan validasi isi, akan tetapi dalam pertanyaan dengan metode skala *likert*, perlu penambahan validasi konstruk (secara statistik).

Untuk mendukung indikator kinerja utama Tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK, Bidang Pemasaryakatan Standardisasi juga melakukan survei tingkat persepsi masyarakat terhadap SPK. Kegiatan ini juga dalam upaya mendukung pencapaian indikator kinerja utama deputi bidang informasi dan pemasaryakatan standardisasi. Kegiatan penyebarluasan informasi, pendidikan, pemasaryakatan standardisasi yang dilakukan BSN diharapkan meningkatkan penerapan SNI di kalangan pelaku usaha dan meningkatkan kepercayaan konsumen akan produk bertanda SNI sehingga masyarakat berorientasi pada produk berSNI. Keberhasilan kegiatan pendidikan, pemasaryakatan standardisasi dan penyebarluasan informasi serta pembinaan penerapan SNI diharapkan akan menghasilkan persepsi masyarakat terhadap SPK semakin baik.

Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian, BSN melakukan survei yang diselenggarakan secara bersamaan dengan survei persepsi masyarakat terhadap daya saing produk berSNI. Survei dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 4000 responden.

Tabel 10. Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2016

Pernyataan	Nilai Indeks	Prosentase	Indeks Total	Indeks Total dalam skala 5
Pengetahuan Tentang BSN	19,13 (dari 25)	76,52	75,02	3,75
Pengenalan Tentang SNI	21,69 (dari 25)	86,76		
Penerapan SNI	19,51 (dari 25)	78,04		
Sertifikasi SNI	14,69 (dari 25)	58,76		

Berdasarkan tabel tersebut, secara keseluruhan persepsi masyarakat terhadap SPK sudah baik. Masyarakat sudah mengetahui institusi BSN yang menetapkan SNI (76,52 %) dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 49,2%. Namun sebagian juga ada yang masih memahami bahwa sertifikasi SNI itu dilakukan oleh BSN. Secara umum, masyarakat sudah tahu SNI, apa itu SNI, dan tanda SNI pada produk (86,76%). Masyarakat mempunyai persepsi yang positif terhadap penerapan SNI untuk meningkatkan daya saing produk dan untuk perlindungan masyarakat (78,04%). Namun terkait dengan sertifikasi SNI, persepsi masyarakat masih rendah (58,76 %). Masyarakat masih melihat bahwa proses sertifikasi itu tidak mudah dan rumit serta mahal. Disamping itu masyarakat juga belum memahami bahwa sertifikasi SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk. Persepsi ini hampir sama untuk semua unsur stakeholder.

Berdasarkan hasil tersebut, tingkat persepsi masyarakat menghasilkan indeks persepsi sebesar 75,02 (skala 100) atau 3.75 (skala 5). Nilai ini tidak mencapai target yang diharapkan sebesar 3,8, atau hanya tercapai 98,7 %. Hal ini dikarenakan nilai yang terkait dengan persepsi tentang Sertifikasi SNI masih rendah, meskipun sudah naik dari tahun sebelumnya yang hanya 50,4 %. Untuk itu, perlu edukasi kepada pemangku kepentingan khususnya kepada pelaku usaha mengenai mekanisme sertifikasi SNI dan juga BSN kerjasama dengan stakeholder perlu meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur mutu (LPK), sehingga LPK mudah didatangi oleh pelaku usaha di wilayah tersebut yang membuat biaya sertifikasi bisa diminimalisir

Untuk melihat efektifitas pelaksanaan pemasyarakatan standardisasi, dalam survei tersebut, BSN juga menanyakan strategi promosi yang diharapkan oleh masyarakat masih didominasi melalui media mainstream seperti TV, Radio, media cetak dll. Responden yang memilih media online sebagai sumber informasi mengenai SNI hanya 6,3%, cenderung turun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 16,6%. Hal ini bisa saja disebabkan karena mayoritas usia responden berada pada rentang 35 – 55 tahun. Pada usia responden ini, lebih menyukai media *mainstream* dan belum banyak yang menyukai media online. Selain itu, masyarakat di daerah masih menyukai informasi yang didapatkan dari media cetak atau televisi. Akademisi (dosen) justru yang lebih banyak memilih media online (sosial media, media berita online) sebagai sumber informasi mengenai SNI.

Indikator 3	Indeks kepuasan pelanggan layanan jasa Informasi dan Diklat standardisasi
------------------------	--

Pengukuran tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa informasi dan diklat standardisasi dilakukan melalui survei kepada pelanggan, yaitu pengguna informasi standardisasi dan peserta pendidikan dan pelatihan standardisasi. Adapun mekanisme survei yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 9.
Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM di Kedeputian IPS

Item Survei	Layanan Jasa Informasi	Layanan Jasa Diklat
Metode	<i>Accidental Sampling*</i>	<i>Total Sampling**</i>

Jumlah responden	150 orang	1153 orang
Waktu Pelaksanaan	Maret s.d Desember	Januari s.d Desember
Tempat Pelaksanaan	Perpustakaan BSN	Lokasi Pelatihan

*) Kuesioner dibagikan kepada pengunjung perpustakaan yang datang berkunjung

**) Kuesioner dibagikan kepada seluruh peserta dan *personal in charge* pelatihan

Pengolahan data dilakukan per unsur layanan yang mengacu pada 14 unsur yang ditetapkan dalam Kepmen PAN dan RB diatas ditambah dengan unsur pengembangan sesuai dengan dimensi atau unsur pengaruh kualitas pelatihan, yaitu instruktur pelatihan, materi pelatihan dan asisten instruktur pelatihan.

Dari hasil pengolahan IKP tersebut di atas, diketahui bahwa Kepuasan pelanggan jasa informasi melalui Perpustakaan BSN berada pada kategori “BAIK” dan Kepuasan pelanggan layanan jasa diklat standardisasi berada pada kategori “SANGAT BAIK”. Secara keseluruhan pencapaian target Indeks Kepuasan pelanggan layanan publik di Kedeputian IPS, tertuang dalam tabel 11 :

Tabel 11.
Capaian dan Target Indeks Kepuasan Pelanggan
Layanan Jasa Informasi Standardisasi dan Layanan Jasa Diklat
Tahun 2015-2016

Dari hasil pengolahan data hasil survey pelanggan, diperoleh hasil sbb :

Indeks Kepuasan Pelanggan	2015			2016			2019
	Target	Capaian	Kategori	Target	Capaian	Kategori	Target
Indeks Kepuasan Pelanggan Layanan Jasa Diklat Standardisasi.	80	82,33	Baik	83	86,32	Sangat Baik	87
Indeks kepuasan pelanggan Layanan Jasa Informasi Standardisasi.	80	81,36	Baik	83	83,16	Baik	85
Rata-rata IKM	80	81,84	Baik	83	84,74	Baik	86

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks kepuasan pelanggan rata-rata pada layanan jasa di Kedepatian IPS sebesar 81,84. Nilai ini masuk ke dalam kategori **BAIK** sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Indikator
4**

**Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang
standarisasi dan penilaian kesesuaian.**

Pada tahun 2016, capaian indikator kinerja untuk prosentase peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) mengalami perubahan dengan ditambahkannya masyarakat yang mendapat edukasi SPK. Masyarakat yang mendapat edukasi SPK dihitung dari masyarakat yang mendapat edukasi dan terpapar kegiatan promosi dari media massa, baik radio, TV, media online, media cetak, dari pertemuan/kampanye massal. Pada era keterbukaan dengan canggihnya perkembangan teknologi informasi, strategi promosi suatu lembaga/organisasi cenderung beralih dari media konvensional ke media nonkonvensional seperti media online/media digital dan pemanfaatan media sosial. Pada tahun 2016 edukasi publik banyak dilakukan melalui media digital, sedangkan promosi melalui media konvensional tetap dilakukan seperti di radio dan televisi dengan melalui sistem partnership, mengingat dana yang terbatas. Sedangkan kegiatan Sosialisasi substansi SNI kepada pelaku usaha dan LPK tetap dilakukan melalui forum workshop/FGD/Pertemuan.

Melalui kegiatan tersebut capaian jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan SPK mencapai 2.072.092 dari target 1.800.000 orang (sebagai baseline). Prosentase peningkatan jumlah masyarakat mencapai 25% dari target 10% yang ditetapkan di tahun 2016 ini. Pencapaian yang melebihi target ini bersumber dari edukasi SNI melalui digital yang bisa menjangkau ratusan ribu orang. Kecenderungan masyarakat saat ini yang lebih suka membaca artikel dari media online, menjadi alternatif bagi strategi promosi ke depannya. Namun begitu untuk menarik minat masyarakat dalam membaca artikel tentang SNI, diperlukan pengemasan artikel dan judul yang menarik sehingga masyarakat ada ketertarikan untuk membaca. Data pencapaian ini masih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia di mana Tahun 2016, usia produktif Indonesia mencapai 178 juta, dengan demikian capaian edukasi SNI baru menyasar

11 persennya. Hal ini berarti masih perlu usaha yang keras dalam menyebarkan informasi dan edukasi SPK kepada masyarakat Indonesia.

Tabel 8. Capaian dan Target IKU 2016

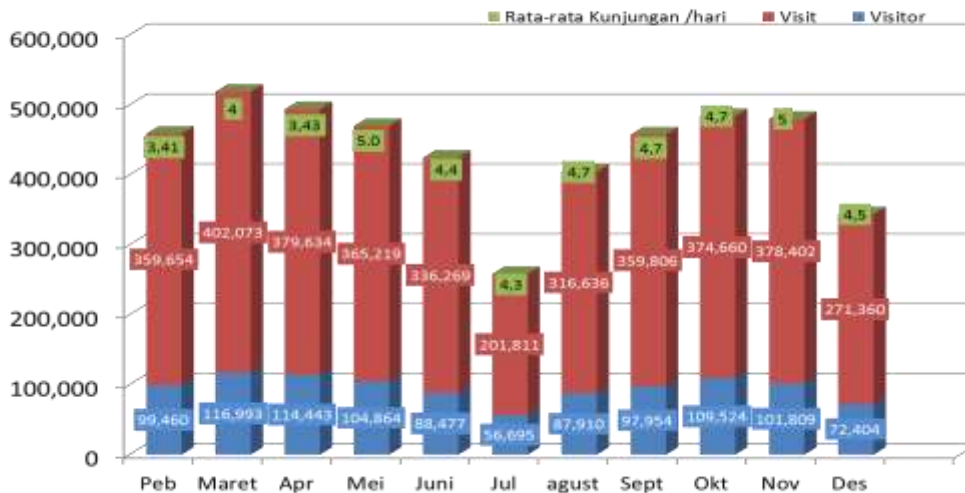
Unsur Indikator	Sub Unsur Indikator	2016			2019
		Satuan	Target	Capaian	Target
Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian.	1. Jumlah pemanfaat paket informasi standarisasi;	Orang	550.000	563.626	
	2. Jumlah peserta pembimbingan UKM;				
	3. Jumlah peserta pendidikan standarisasi (dosen/guru & mahasiswa/siswa);				
	4. Jumlah peserta pelatihan standarisasi (Instruktur & peserta);				
	5. Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam edukasi, diklat, pameran, sosialisasi dan pemasyarakatan standarisasi				
	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam edukasi, diklat, pameran, sosialisasi dan pemasyarakatan standarisasi melalui TV, Radio dan e-learning	Orang/ Pengunjung /Pembaca	1.250.000	1.508.466	
Jumlah total		orang	1.800.000	2.072.092	

Pada tahun 2016 jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi dalam kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian mencapai 2.072.092 orang. Capaian ini melebihi target 1.800.000 dengan persentase kenaikan 15%.

Indikator 5 Jumlah akses informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis TIK

Jumlah akses informasi standarisasi dan penilaian kesesuaian berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) adalah jumlah akses terhadap informasi SPK melalui visit ke web BSN. Target tahun 2016 adalah 1.400.000 akses, sedangkan capaiannya adalah 3.781.924. Terjadi peningkatan akses sebesar 270%.

Monitoring Kinerja Portal Informasi Standardisasi – BSN Tahun 2016



2. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Kedeputan Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi diberikan alokasi pendanaan kegiatan yang berasal dari Rupiah Murni maupun dari Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), adapun jumlah dan kondisi anggaran Kedeputan IPS dalam kurun waktu 2015 s.d 2016, adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 14 :

Tabel 14
Perbandingan Kinerja anggaran Kedeputan IPS Tahun 2015 - 2016

SUMBER ANGGARAN	KOMPONEN	JUMLAH ANGGARAN KEDEPUTIAN IPS		KETERANGAN (*)
		TAHUN 2015	TAHUN 2016	
DIPA	Pagu	16.175.593.000	8.862.045.109	Turun 45 %
	Penyerapan	15.369.768.009	8.855.598.728	
	% Penyerapan	95,02%	99,7%	Naik 4,93 %

Keterangan : (*) Persentase perbandingan tahun 2015 terhadap tahun 2014

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari laporan akuntabilitas kinerja Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi - Badan Standardisasi Nasional TA. 2016 dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja TA. 2016 telah dapat dipenuhi oleh Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan dengan tingkat capaian 99,7%.

Dari seluruh hasil capaian kinerja sasaran tersebut di atas, tetap diperlukan upaya guna meningkatkan kinerja Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan di masa mendatang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal sehingga dapat mencapai target yang direncanakan.

Kiranya LAKIP Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan BSN Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja BSN, khususnya Kedeputian Informasi dan Pemasarakatan Standardisasi di masa mendatang.